KASUS KEWARGANEGARAAN GANDA BUPATI SABU RAIJUA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS

Nama Penulis : TUHFAH FADHILAH HERMAN

NIM : 10200120222

Abstrak

Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menarik perhatian banyak pihak karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang sama juga masih tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI). Tulisan ini membahas bagaimana status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih NTT dari perspektif yuridis. Hasil pembahasan menyimpulkan, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Untuk itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan dalam Pilkada dan sistem administrasi data kependudukan agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi

Kata Kunci : Kewarganegaraan ganda, Perspektif, Yuridis

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

¹Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore (Orient) diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat balasan dari Kedubes Amerika yang membenarkan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan informasi, Orient pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient (Kompas.com, 3 Februari 2021).

Terkait masalah kewarganegaraan ganda Orient, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan perihal status kewarganegaraan Orient kepada KPU Pusat. Dalam laporan tersebut, KPU NTT menyebut Orient merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah mengklarifikasi ke Disdukcapil Kota Kupang. Dalam berita acara klarifikasi bersama dinyatakan bahwa Orient telah tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 (Kompas.com, 4 Februari 2021).

¹ "Bupati Sabu Raijua Terpilih Ternyata WN AS, Ketua Komisi II DPR: Kecolongan", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan>, diakses 13 Februari 2021.

²Menanggapi masalah kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada mantan pejabat publik yaitu Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, selain soal syarat administrasi kepemiluan yang saat ini sedang ditangani KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kasus Orient ini makin memperjelas betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah (Tribunnews.com, 5 Februari 2021).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan status dan kewarganegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana kronologi pengungkapan kewarganegaraan ganda orient?
3. Apa status kewarganegaraan calon bupati di mata para ahli?
4. Bagaimana erspektif yuridis dan upaya dalam menyelesaikan kasasus orient?

Adanya masalah kewarganegaraan ganda terhadap bupati terpilih Orient, menarik untuk dibahas. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih di NTT ditinjau dari perspektif yuridis (UU Kewarganegaraan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu – isu yang dihadapi dan menggunakan jenis data penelitian sekunder yaitu mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berjudul laporan.

B. PEMBAHASAN

Pengaturan Status dan Kewarganegaraan di Indonesia

Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam suatu negara. Ketentuan itu menjadi pedoman menentukan status kewarganegaraan.¹⁰ Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang diperoleh seseorang. Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran atau *Ius Soli* dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan hubungan darah atau *Ius Sanguinis*.³

Perbedaan asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* mengakibatkan munculnya kewarganegaraan ganda. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, Swiss, Turki, Jamaika menganut kewarganegaraan ganda. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 44 negara yang menerapkan kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda lahir karena negara-negara itu memiliki persyaratan

² "Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu Kore Permintaan Maaf hingga Sorot Komisi I DPR", 5 Februari 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/05/terkini-polemik-bupati-sabu-raijua-orient-p-riwu-kore-permintaan-maaf-hingga-sorot-komisi-i-dpr?>, diakses 14 Februari 2021.

³ Sali Kadria. (2017). A Historical View about Concepts, Theories and Types of Nationalism. *Anglisticum, Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(6), hlm. 25.

kewarganegaraan berbeda.⁴

Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting. Warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya negara. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik. Individu yang menjadi warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan negara wajib melindungi warga negara di mana pun berada.⁵

⁶Namun pada kenyataannya, di suatu negara terdapat seorang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau apatride dan mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan atau *multiple citizenship*. Konvensi 1954 mengenai Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun di bawah yurisdiksi hukum. Belakangan ini terjadi peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan atau berpotensi berisiko tanpa kewarganegaraan. Salah satu negara yang mengalami peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan tersebut, yaitu Amerika Serikat.

Politik hukum kewarganegaraan Indonesia menganut prinsip berkewarganegaraan tunggal. Prinsip kewarganegaraan tunggal sudah dianut sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Adapun beberapa peraturan tentang kewarganegaraan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; serta
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sistem kewarganegaraan tunggal diterapkan untuk mengantisipasi kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan. Prinsip asas

⁴ W. Wahono & Abdul Atsar. (2019). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 44.

⁵ Rahmawati Novia Sigit. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis, Universitas Jambi*, 7(1), hlm. 113.

⁶ Donald Kerwin, et al. (2020). Statelessness in the United States: A Study to Estimate and Profile the US Stateless Population. *Journal on Migration and Human Security, SAGE journals*, 8(2), hlm. 151.

kewarganegaraan tunggal yang dijelaskan pada penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2006 membuat tidak ada ruang bagi orang berkewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan.⁷

Negara Indonesia menerapkan prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* secara terbatas. Prinsip *Ius Soli* mendefinisikan semua orang yang lahir di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan, prinsip *Ius Sanguinis* mendefinisikan semua orang yang lahir dari keturunan Warga Negara Indonesia di luar negeri adalah Warga Negara Indonesia. UU No. 12 Tahun 2006 mengakomodasi penerapan status kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.⁸

Pembentuk undang-undang mengatur status kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan campuran. Permasalahan itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung ataupun setelah berakhirnya perkawinan. Kewarganegaraan ganda terbatas menimbulkan konsekuensi pada anak hasil perkawinan campuran, di mana anak diharuskan tunduk pada dua yurisdiksi dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan.⁹

Status kewarganegaraan ganda diatur di sejumlah pasal dalam UU No. 12 Tahun 2006, meliputi Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 huruf c, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (4), serta Pasal 41.

Jika merujuk pada ketentuan di atas, Negara Indonesia mengakui adanya asas kewarganegaraan ganda yang terbatas untuk anak. Anak memiliki kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan sampai batas umur yang ditentukan, yaitu 18 tahun atau sampai anak tersebut menikah. Kebijakan ini dikeluarkan karena peraturan sebelumnya tidak tercermin hak asasi manusia untuk anak dari hasil perkawinan campuran sehingga mencederai hak asasi anak tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan baru ini diharapkan tidak ada lagi anak dari hasil perkawinan campuran yang tidak memiliki kewarganegaraan.

¹⁰Namun, dalam pelaksanaan penerapan status kewarganegaraan ganda dalam UU No. 12 Tahun 2006 menimbulkan permasalahan. Permasalahan terjadi, karena ketentuan tersebut tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita Warga Negara Asing yang menikah dengan pria Warga Negara Indonesia, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengakibatkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran. Faktor perbedaan kewarganegaraan diantara para pihak yang membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan tidak campuran. Perbedaan kewarganegaraan tidak

⁷ Chelsea Chesy Bernanda. (2020). Pemberian Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Tahar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Universitas Surabaya*, 18(1), hlm. 204.

⁸ May Lim Charity. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 13(4), hlm. 816.

⁹ Eka Martiana Wulansari. (2015). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Rechts Vinding Online, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI*, hlm. 1.

¹⁰ Achmadudin Rajab. (2017). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 14(3), hlm. 541.

saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.

Memilih kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia. Sehingga, siapapun termasuk negara tidak dapat memaksakan kehendak kepada seseorang menentukan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan merupakan dampak dari interaksi antar umat manusia di dunia. Perkawinan campuran tidak dapat dilarang, karena ini merupakan hak asasi manusia untuk memilih seseorang menjadi pasangan hidup. Perkawinan campuran berdampak hukum pada status kewarganegaraan suami dan istri serta anak yang hadir dari hasil perkawinan tersebut. Atas dasar itu, negara tidak boleh menggunakan instrumen undang-undang memaksa seorang anak memilih ikut kewarganegaraan ayah atau ibu, Negara hanya berkepentingan seseorang memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Negara bertanggungjawab melindungi warga negara, sebagaimana berdasarkan Pasal 28 D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa *"setiap orang berhak atas status kewarganegaraan"*. Pada ketentuan itu, tidak dijelaskan seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Hanya mengatur seorang warga negara harus mempunyai kewarganegaraan dan tidak berstatus tidak mempunyai kewarganegaraan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dan memberikan jaminan kepastian hukum tentang siapa saja Warga Negara Indonesia itu sehingga tercermin adanya persamaan hukum di antara warga negara. Di sejumlah negara, ada yang melegalkan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda ada juga yang melarang adanya kewarganegaraan ganda.

Kronologi Pengungkapan Kewarganegaraan Ganda Orient

¹¹Masalah status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, yaitu kewarganegaraan AS dan Indonesia menarik perhatian banyak pihak terlebih setelah Orient memenangkan Pilkada pada tahun 2020. Adapun kronologi pengungkapan status kewarganegaraan ganda Orient sebagai berikut:

Pertama, Orient tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 dengan NIK DKI: 0951030710640454 status dalam database sistem kependudukan pada tahun 1997 dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Orient mengajukan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWN) pada Juli 2020 dan pada bulan Agustus 2021, Dukcapil Jakarta menerbitkan SKPWN dengan nomor: SKPWN/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kupang (Kompas. com, 6 Februari 2021).

Kedua, pada September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati beberapa instansi yakni KPU Kabupaten Sabu Raijua, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT terkait keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan permintaan data kewarganegaraannya. Bawaslu juga menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu mengecek status kewarganegaraan Orient. Pada Januari 2021 Kedutaan Besar

¹¹ "Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA Orient Riwu Kore", 4 Februari 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-orient-riwu-kore>, diakses 12 Februari 2021.

Amerika Serikat memberikan keterangan melalui email pribadi Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu adalah benar warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan Kepada Bawaslu RI terkait surat balasan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut dan memastikan kebenaran Surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut adalah benar data dari Orient Patriot Riwu Kore (Berita Satu, 4 Februari 2021).

¹²Terkait status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Februari 2021 mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Amerika dan Eropa, Perihal informasi keabsahan surat yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient. Selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU RI untuk melakukan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua dan melakukan tindak lanjut atas terbitnya surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika berdasarkan kewenangan KPU.

Status Kewarganegaraan Calon Bupati di Mata Ahli

Margarito Kamis selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon dalam keterangannya mengatakan UUD 1945 hanya akan memberikan hak kepada warga negaranya untuk memilih dan melaksanakan penyelenggara kekuasaan negara. Dalam keterangan ini, Margarito mengemukakan dalam konsep citizen atau kewarganegaraan tidak pernah tidak dipertalikan dengan orang-orang yang ada di satu daerah yang sejak awal bersepakat menjadi suatu komunitas dalam suatu tatanan sosial yang diakui sebagai pribadi yang merdeka dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Artinya, citizen adalah mereka yang tinggal dalam kota dan memiliki hak serta bebas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karenanya, Margarito menegaskan bahwa hal ini harus pula dipertalikan dengan posisi orang di dalam komunitas itu dan menunjuk adanya hak menjalankan partisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan.

¹³Dalam kerangka ini, Margarito mencermati usai Revolusi Prancis konsep citizen ditunjukkan pula dalam UUD 1945 bahwa orang-orang yang berasosiasi dalam suatu kedaulatan adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut dan hanya mereka pula yang memegang seluruh hak dan kewajiban membernuk pemerintahan negaranya. Cara pandang ini, kata Margarito, termaktub dalam UUD 1945 bahwa kedaulatan hanya ada di tangan rakyat.

Sementara itu berkaitan dengan akibat hukum jika orang asing mendaftarkan diri menjadi kepala daerah dan dinyatakan seluruh dokumennya sah oleh KPU, Margarito menilai hal ini dapat dinyatakan seseorang tersebut tidak punya hak dan tidak pula memenuhi syarat hukum untuk menjadi kepala daerah. Apabila syarat

¹² "Menyoal Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih", 6 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/06/10454211/menyoal-status-kewarganegaraan-ganda-bupati-sabu-raijua-terpilih?>, diakses 12 Februari 2021.

¹³ "Polemik Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua, Berstatus WNI dan Punya Paspor AS", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/08112891/polemik-kewarganegaraan-bupati-sabu-raijua-berstatus-wni-dan-punya-paspor-as?>, diakses 10 Februari 2021

kewarganegaraan tidak terpenuhi, maka demi hukum semua hal yang terkandung di dalam pengajuan syarat dan lainnya tersebut pun dapat dinyatakan tidak sah. Sehingga yang bersangkutan tidak punya hak apapun dalam pemilihan.

Hendri Dunant selaku saksi yang dihadirkan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Ketua RW mengatakan bahwa Orient Patriot Rewu Kore mengajukan permohonan untuk surat domisili pindah alamat dari wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara ke wilayahnya di daerah Melawai, Jakarta Selatan. Diakuinya, berpedoman pada registrasi tertanggal 9/12/2019 dirinya menerima pengajuan pindah domisili berupa surat pengantar dari RT 03/RW 07 Tanjung Priok, Jakarta Utara ke wilayah Jakarta Selatan.

Sementara itu, Samuel P. Selaku Tim Data Paslon 01 dalam keterangan Saksi Pemohon mengatakan menemukan kejanggalan pada KTP Orient saat mendaftarkan diri saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SabuRaijua Tahun 2020. Dirinya mendapati NIK yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah Kupang. Mestinya, jelas Samuel, kode untuk NIK wilayah Kupang adalah 5371, sementara kode yang ada pada NIK Orient adalah 3172 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil daerah Kupang.

Selanjutnya Alberky M. Selaku Tim Penghubung Paslon 01 dengan KPU dalam kesaksiannya mengatakan telah mengetahui status kewarganegaraan Orient sejak 2018. Saat itu hal ini ramai dibicarakan masyarakat di SabuRaijua karena Orient mensponsori pertandingan sepak bola yang diselenggarakan di daerah tersebut.

Maruarar Siahaan selaku Ahli yang dihadirkan Pihak Terkait mengatakan asas kewarganegaraan di Indonesia adalah asas tunggal. Tetapi juga dibuka kemungkinan adanya kewarganegaraan ganda terutama setelah adanya norma hukum UU Nomor 12 Tahun 2006. Sehingga dalam kaitan dengan perkara a quo, dirinya melihat persoalan ini suatu perkembangan dari globalisasi khususnya pula bagi orang Indonesia. Dalam sudut pandangnya, ia menyarankan dalam perkara a quo memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menilai serangkaian keputusan, terlebih lagi permasalahan pemilihan telah sampai pada penetapan kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, dari perkara ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam memutuskan akan melantik atau tidak atas terpilihnya kepala daerah ini.

Dalam pandangannya, Maruarar menyatakan saat ini dunia telah berada dalam tahap satu kesatuan global sehingga tidak tertutup kemungkinan dibutuhkannya diaspora. Mengingat ilmu dan modal yang dimiliki para diaspora sangat dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia. Dalam perkara ini, Orientbelumlah kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena belum ada pernyataan pribadi untuk melepas kewarganegaraannya.

Nurudin selaku Ahli Pihak Terkait menerangkan terkait kewarganegaraan ganda terbatas yang dapat dimiliki seseorang hingga usia 18 tahun dan setelahnya yang bersangkutan harus memilih untuk berkewarganegaraan Indonesia atau lainnya. Sehubungan dengan ini, terhadap adanya permasalahan implementasi seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, Nurudin menjabarkan hal demikian terjadi di antaranya apabila seseorang telah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan yang dinyatakan kepada Presiden, dan memiliki paspor atau dokumen resmi lainnya dari negara lain sebagai tanda kewarganegaraan lain atas

namanya.

Sebagai informasi dalam sidang terdahulu Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten SabuRaijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati SabuRaijua Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. Hal ini terkait temuan Bawaslu Kabupaten SabuRaijua yang menyebutkan Bupati terpilih atas nama Orient Patriot Rewu Kore merupakan warga negara Amerika Serikat. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK hadir untuk kepastian hukum terhadap permasalahan ini.

Sejatinya Pemohon sangat keberatan dengan keputusan KPU SabuRaijua (Termohon) karena menurut temuan Bawaslu pasangan calon yang menang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Pemohon, keputusan Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas fakta hukum tersebut, Pemohon dalam Petition memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SabuRaijua karena melanggar Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Butir 18. Kemudian, menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SabuRaijua Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten SabuRaijua.

Perspektif Yuridis dan Upaya Penyelesaian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Terkait status kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasa 6 ayat (1) Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) yang memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, seseorang dapat memilih salah satu warga negara untuk menjadi kewarganegaraannya. Selama memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan campuran tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tua (Glery Lazuardy, 2020:44).

Berdasarkan ketentuan di atas, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau *bipatride* dan tanpa kewarganegaraan atau *apatride*. UU Kewarganegaraan mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian status kewarganegaraan ganda yang dimiliki bupati terpilih Orient bertentangan dengan UU Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan.

Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan hilang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesiapada Pasal 31 ayat (1)

huruf g dan dalam UU Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Berdasarkan Pasal 23 tersebut, status kewarganegaraan Amerika Serikat yang masih dimiliki Orient akan membuat Orient kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila memilih menjadi warga negara Indonesia.

Selain itu, persoalan kewarganegaraan ganda Orient menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem data kependudukan. Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu, namun juga terkait persoalan administrasi kependudukan. Terkait masalah kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai (Kompas.com, 4 Februari 2021), penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, telah kecolongan dengan terungkapnya status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient yang ternyata berkewarganegaraan Amerika Serikat. Doli mengatakan, kejadian tersebut harus didalami apakah memang terjadi karena ada kelalaian dari pihak penyelenggara pemilu atau ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Orient. Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengkaji secara mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan kewarganegaraan ganda Orient tersebut.

Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar Orient digugurkan sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih dan menjadikan calon bupati yang meraih suara terbanyak kedua sebagai calon bupati terpilih agar tidak perlu mengulang penyelenggaraan Pilkada. Di samping itu, Ketua Komisi II DPR RI juga menyayangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang baru memberi penjelasan terkait kewarganegaraan Orient setelah rangkaian Pilkada tuntas (Kompas.com, 4 Februari 2021).

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah:

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan karena Orient masih menjadi warga negara Amerika Serikat.

Kedua, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, apabila berstatus warga negara AS maka gugur dengan sendirinya. Namun UU Pilkada juga memiliki kelemahan di mana dalam Pasal 7 ayat (2) terkait persyaratan calon kepala daerah memang tidak mencantumkan secara tegas bahwa yang menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia.

C. PENUTUP

Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient mengakibatkan Orient terancam kehilangan statusnya sebagai WNI. Lebih lanjut hal tersebut dapat menyebabkan hak-hak politik Orient menjadi gugur. Karenanya Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila ingin menjadi WNI. Untuk itu, Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi terhadap UU Pilkada, khususnya terkait dengan persyaratan calon kepala daerah agar ke depan masalah status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi lagi. Selain itu, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran UU Kewarganegaraan khususnya terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient.

DAFTAR PUSTAKA

- "Bupati Sabu Raijua Terpilih Ternyata WN AS, Ketua Komisi II DPR: Kecolongan", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan>, diakses 13 Februari 2021.
- "Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu Kore Permintaan Maaf hingga Sorot Komisi I DPR", 5 Februari 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/05/terkini-polemik-bupati-sabu-raijua-orient-p-riwu-kore-permintaan-maaf-hingga-sorot-komisi-i-dpr?>, diakses 14 Februari 2021.
- W. Wahono & Abdul Atsar. (2019). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 44.
- Sali Kadria. (2017). A Historical View about Concepts, Theories and Types of Nationalism. *Anglisticum, Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(6), hlm. 25.
- Rahmawati Novia Sigit. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis, Universitas Jambi*, 1(1), hlm. 113.
- Donald Kerwin, et al. (2020). Statelessness in the United States: A Study to Estimate and Profile the US Stateless Population. *Journal on Migration and Human Security, SAGE journals*, 8(2), hlm. 151.
- Chelsea Chesy Bernanda. (2020). Pemberian Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Tahar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Universitas Surabaya*, 18(1), hlm. 204.
- May Lim Charity. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 13(4), hlm. 816.
- Eka Martiana Wulansari. (2015). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Rechts Vinding Online, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI*, hlm. 1.
- Achmadudin Rajab. (2017). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 14(3), hlm. 541.
- "Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA Orient Riwu Kore", 4 Februari 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-orient-riwu-kore>, diakses 12 Februari 2021.
- "Menyoal Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih", 6 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/06/10454211/menyoal-status-kewarganegaraan-ganda-bupati-sabu-raijua-terpilih?>, diakses 12 Februari 2021.
- "Polemik Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua, Berstatus WNI dan Punya Paspor AS", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/08112891/polemik-kewarganegaraan-bupati-sabu-raijua-berstatus-wni-dan-punya-paspor-as?>, diakses 10 Februari 2021